

SEKULARISASI DITINJAU KEMBALI¹

Oleh Nurcholish Madjid

Pertama perlu ditegaskan bahwa saya membuat perbedaan prinsipal antara sekularisme dan sekularisasi. Sekularisme adalah suatu paham yang tertutup, suatu sistem ideologi tersendiri dan lepas dari agama. Inti sekularisme ialah penolakan adanya kehidupan lain di luar kehidupan duniawi ini. Dari perspektif Islam, sekularisme adalah perwujudan modern dari paham dahriyah, seperti diisyaratkan dalam al-Qur'an: *“Mereka berkata, ‘Tiada sesuatu kecuali hidup duniawi kita saja — kita mati dan kita hidup — dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa’. Tapi mereka sebenarnya tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Mereka hanyalah menduga-*

¹ Diambil dari catatan kaki (no. 1), tulisan berjudul “Sekitar Usaha Membangkitkan Etos Intelektualisme Islam di Indonesia” dalam Endang Basri Ananda (ed.), *70 Tahun Prof. Dr. Rasjidi* (Jakarta: Harian Pelita, 1985) (yang dimuat sebagai bagian II, Bab XII kumpulan tulisan ini juga), disertai pendahuluan sebagai berikut: “Tulisan polemis Pak Rasjidi yang ditunjukkan kepada saya ialah yang bersangkutan dengan ide saya dan teman-teman tentang perlunya pembaruan pemikiran dalam Islam di Indonesia. Ide itu pertama kalinya saya cetuskan dalam sebuah makalah dalam suatu pertemuan antara tokoh-tokoh GPI, HMI, dan PII di aula Menteng Raya 58, pada Januari 1970 (makalah ini dan makalah-makalah yang berkaitan, dimuat selengkapnya pada bab ini juga — penyunting). Di antara sekian banyak hal dalam makalah itu menjadi sasaran kritik Pak Rasjidi, yang terpenting ialah konsep saya tentang sekularisasi. Meskipun di sini bukanlah tempatnya untuk mengulas kritik Pak Rasjidi itu, namun, guna memenuhi suatu harapan yang bisa diduga dari orang yang membaca tulisan ini, saya ingin menyinggungnya sepintas lalu dalam bentuk suatu catatan kaki”.

duga saja,” (Q 45:24). Jadi jelas, sekularisme tidak sejalan dengan agama, khususnya agama Islam.

Pengertian Sosiologis Sekularisasi

Sementara itu, sekularisasi memang dapat diartikan sebagai proses sosial politik menuju sekularisme, dengan implikasi paling kuat ide pemisahan (total) agama dari negara. Tapi, ini bukanlah satu-satunya arti istilah sekularisasi. Arti lain istilah itu ialah yang bersifat sosiologis, bukan filosofis, seperti yang digunakan oleh Talcott Parsons dan Robert N. Bellah. Parsons menunjukkan bahwa sekularisasi, sebagai suatu bentuk proses sosiologis, lebih banyak mengisyaratkan kepada pengertian pembebasan masyarakat dari belenggu takhayul dalam beberapa aspek kehidupannya. Dan hal ini tidak berarti penghapusan orientasi keagamaan dalam norma-norma dari nilai kemasyarakatan itu.² Bahkan, proses pembebasan dari takhayul itu bisa semata-mata terjadi karena dorongan, atau merupakan kelanjutan logis dari suatu bentuk orientasi keagamaan, khususnya monoteisme. Ini menjadi pandangan Robert N. Bellah, misalnya ketika ia mengemukakan ciri-ciri masyarakat Islam Klasik (zaman Nabi dan *al-Khulafā' al-Rāsyidūn*) yang ia nilai sebagai sebuah masyarakat modern. Bellah menyebutkan beberapa unsur struktural Islam Klasik yang relevan dengan argumennya (bahwa Islam Klasik itu modern), yaitu monoteisme yang kuat, tanggung jawab pribadi di hadapan Allah, devaluasi radikal, atau sekularisasi pranata kesukuan Arab jahiliah, dan, akhirnya, sistem politik demokratis. Untuk jelasnya, mengenai sekularisasi itu ia mengatakan bahwa Islam Klasik telah melakukan “devaluasi radikal, dan orang dibenarkan menyebutnya sekularisasi, atas semua struktur sosial yang ada berhadapan dengan hubungan antara Allah

² Parsons, (*et.al.*), *Theories of Society: Foundation of Modern Sociological Theory* (New York: Free Press, 1961).

dan manusia yang sentral itu. Di atas segalanya, hal ini berarti pencopotan pranata kesukuan atau perkeluargaan (*kinship*), yang telah menjadi pusat kesucian Arabia sebelum Islam, dari makna sentralnya”. Dengan kata lain, proses “devaluasi radikal” atau “sekularisasi” itu, dalam pandangan sosiologis Bellah, berpangkal dari monoteisme yang antara lain berakibat penurunan nilai pranata kesukuan dan perkeluargaan yang di zaman jahiliah menjadi pusat rasa kesucian hanya kepada Tuhan Yang Mahaesa belaka.³

Jadi, penggunaan kata “sekularisasi” dalam sosiologi mengandung arti pembebasan, yaitu pembebasan dari sikap penyucian yang tidak pada tempatnya. Karena itu mengandung makna desakralisasi, yaitu pencopotan ketabuan dan kesakralan dari obyek-obyek yang semestinya tidak tabu dan tidak sakral. Jika diproyeksikan kepada situasi modern Islam sekarang, maka “sekularisasi”-nya Robert N. Bellah itu akan mengambil bentuk pemberantasan bidah, khurafat, dan praktik syirik lainnya, yang kesemuanya itu berlangsung di bawah semboyan kembali kepada Kitab dan Sunnah dalam usaha memurnikan agama. Maka saya pernah mengajukan argumen bahwa sekularisasi serupa itu, seperti telah dikemukakan, berkenaan dengan pandangan sosiologis Bellah, adalah konsekuensi dari tauhid. Tauhid sendiri menghendaki pengarahannya setiap kegiatan hidup untuk Tuhan, demi rida-Nya, dan hal ini, bagi sementara orang, justru merupakan bentuk sakralisasi kehidupan manusia. Hal ini tidak salah, bahkan sesuai dengan pengertian sosiologis Bellah tersebut — yang juga saya anut — sebab, pengertian itu mengandung makna pengalihan sakralisasi dari suatu obyek alam ciptaan (makhluk) ke Tuhan Yang Mahaesa. Pranata kesukuan, seperti disebut Bellah, hanyalah salah satu dan merupakan yang terpenting dari rasa kesucian jahiliah. Tetapi sesungguhnya, orang-orang Arab jahiliah yang menyucikan atau menyembah obyek lain, yang kesemuanya itu, dalam pandangan Islam, termasuk manifestasi

³ Lihat Bellah, *Beyond Belief* (New York: Harper & Row, Publishers, 1970), h. 151.

politeisme (syirik). Sedangkan yang Mahasuci hanyalah Tuhan (*subhān-a 'l-Lāh*). Karena hanya Tuhan yang sakral, maka seluruh kegiatan, untuk bisa mendapatkan maknanya yang hakiki, harus hanya ditujukan kepada-Nya semata, dengan implikasi orientasi kegiatan demi kebenaran (*al-Haqq*), secara tulus dan ikhlas.

Kontroversi Konsep Sekularisasi

Tapi, meskipun pengertian sosiologis sekularisasi itu sudah cukup banyak digunakan para ahli ilmu-ilmu sosial, *toh* harus diakui bahwa masih tetap terdapat kontroversi di sekitar istilah itu. Hal ini dicerminkan oleh adanya perdebatan dan polemik di sekitar buku Harvey Cox, *Secular City*. Kesulitan timbul dari kenyataan bahwa masa *Enlightenment* Eropa telah melahirkan filsafat sekularisme sebagai suatu ideologi yang secara khusus bersemangat anti-agama. Karenanya, cukup sulit untuk menentukan kapan proses sekularisasi, dalam makna sosiologisnya, berhenti dan berubah menjadi proses penerapan sekularisme filosofis itu.⁴ Inilah yang agaknya menjadi dasar penolakan Pak Rasjidi atas penggunaan saya akan istilah sekularisasi. Jika benar dugaan ini, maka keberatan Pak Rasjidi cukup beralasan dan dapat diterima, yaitu jika sekularisasi memang tak mungkin lepas dari sekularisme filosofis hasil masa *Enlightenment* Eropa tadi. Dan rumitnya, persoalan “sekularisasi” itu dapat disimpulkan dari editorial Richard Hunt, “*The Role of Religion in a Changing World*”.⁵ Di situ Hunt mengatakan bahwa keinginan untuk memiliki alat rumah tangga yang baik seperti kulkas pun mempunyai implikasi sekularisasi, sadar, ataupun tak sadar.

⁴ Peter E. Clasner, *The Sociology of Secularization* (London: Routledge & Kegan Paul, 1977), h. 34.

⁵ Dalam *Mizan*, Jakarta Vol. I No. 3, 1984.

Kesimpulan

Kesimpulannya, terdapat perbedaan cukup prinsipal antara pengertian “sekularisasi” secara sosiologis dan secara filosofis. Dan karena sedemikian kontroversialnya istilah “sekular”, “sekularisasi” dan “sekularisme” itu, maka adalah bijaksana untuk tidak menggunakan istilah-istilah tersebut, dan lebih baik menggantikannya dengan istilah-istilah teknis lain yang lebih tepat dan netral. [❖]